



Analisis Permasalahan Dan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Kabupaten Bone Berdasarkan Data Sekunder Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Widya Astuti¹ Hamsah² Bustan Ramli³ Siti Nikmah Marzuki⁴

Institut Agama Islam Negeri Bone¹²³⁴

astutiwidya912@gmail.com, Hamsahfs93@gmail.com, bustan.ramli62@gmail.com, sitinikmahmarzuki@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 25 Oktober 2025

Revised: 28 Oktober 2025

Accepted: 29 Oktober 2025

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Mikro
Inklusi Keuangan; Literasi
Keuangan; Pembangunan
Ekonomi Lokal; Tata Kelola

ABSTRACT

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah di daerah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja serta permasalahan yang dihadapi LKM di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi terhadap publikasi resmi yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan mikro, indikator ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyaluran pembiayaan UMKM di Kabupaten Bone mencapai Rp 3,54 triliun, LKM masih menghadapi hambatan struktural berupa lemahnya tata kelola, minimnya digitalisasi, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut berdampak pada kinerja keuangan yang fluktuatif dan keterbatasan jangkauan terhadap kelompok rentan. Rekomendasi kebijakan berfokus pada penguatan kapasitas manajerial, peningkatan program literasi keuangan, serta dukungan regulasi dan teknologi guna memperkuat keberlanjutan LKM dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Bone.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Widya Astuti, Hamsah Bustan Ramli, Siti Nikmah Marzuki
Institut Agama Islam Negeri Bone
astutiwidya912@gmail.com, Hamsahfs93@gmail.com,
sitinikmahmarzuki@gmail.com

bustan.ramli62@gmail.com,

1. LATAR BELAKANG

Industri lembaga keuangan mikro (LKM) memegang peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mikro, khususnya di wilayah-kabupaten. Dengan semakin beratnya tantangan ekonomi seperti dampak pandemi, keterbatasan akses pembiayaan dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan nyata bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks tersebut, di wilayah kabupaten seperti Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan) keberadaan LKM menjadi semakin penting untuk menjembatani antara lembaga keuangan formal dan masyarakat yang selama ini belum terlayani dengan optimal. Data nasional menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan mengalami peningkapan survei. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 % dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 % secara nasional. (OJK Portal) Namun, sektor lembaga keuangan mikro mencatat indeks literasi hanya sebesar 9,80 % dan inklusi sebesar 1,20 % — jauh di bawah rata-rata nasional dan sektor lainnya. (OJK Portal) Hal ini mengindikasikan adanya gap signifikan antara potensi dan realisasi layanan keuangan mikro, serta besarnya tantangan dalam pengembangan LKM.

Di tingkat regional Provinsi Sulawesi Selatan, data menunjukkan penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 61,62 triliun per Juni 2025 dan jumlah debitur sebanyak 917.957. (Rakyatku.Com) Khusus untuk Kabupaten Bone tercatat bahwa dari kredit UMKM tersebut, penyaluran di Kabupaten Bone mencapai Rp 3,54 triliun. (Rakyatku.Com) Angka ini menunjukkan bahwa meskipun akses pembiayaan relatif besar, masih banyak hal yang perlu dianalisis, seperti kualitas pembiayaan, efektivitas layanan LKM, serta kendala operasional di tingkat kabupaten.

Meskipun kontribusi sektor keuangan di Kabupaten Bone terhadap ekonomi lokal telah tercatat (misalnya, pada tahun 2010 sektor keuangan/kegiatan jasa di Bone mencatat NTB Rp 404,27 miliar dengan kontribusi 5,37% dari seluruh sektor tersier) (BPS API) tetapi belum banyak riset kualitatif yang secara khusus mengeksplorasi kinerja dan permasalahan LKM di kabupaten tersebut berdasarkan data sekunder dari OJK dan BPS. Ketersediaan data sekunder seperti direktori LKM dari OJK (misalnya jumlah perusahaan LKM berizin sebanyak 244 per Juni 2025) (OJK Portal) memberikan peluang untuk studi mendalam namun belum banyak digunakan dalam penelitian di tingkat lokal Kabupaten Bone.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan LKM antara lain: isu regulasi dan izin, sumber daya manusia, teknologi dan digitalisasi, risiko pembiayaan (*non-performing loan*), serta integrasi dengan ekosistem keuangan formal dan UMKM. Data sekunder OJK dan BPS memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran kuantitatif (misalnya jumlah LKM, jumlah debitur, outstanding pembiayaan) dan kemudian mengkaji secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas LKM di Kabupaten Bone. Misalnya, dengan melihat direktori LKM yang berizin dan sebarannya secara nasional, kemudian mengaitkannya dengan akses lokal di Bone.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam permasalahan dan kinerja LKM di Kabupaten Bone melalui pendekatan kualitatif berbasis data sekunder OJK dan BPS. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan (pemerintah kabupaten, OJK regional, lembaga keuangan mikro) dalam meningkatkan efektivitas, inklusi, dan keberlanjutan LKM di wilayah tersebut serta memperkuat kontribusi sektor keuangan mikro terhadap pembangunan ekonomi lokal.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Lembaga Keuangan Mikro dan Peranannya dalam Perekonomian Daerah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Menurut Ledgerwood (2013), LKM merupakan lembaga yang memberikan layanan keuangan, seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi mikro, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Di Indonesia, peran LKM sangat signifikan dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menegaskan bahwa LKM juga menjadi pilar penting dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal (OJK, 2025).

Di Kabupaten Bone, keberadaan LKM menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi sektor agraris dan perdagangan kecil. Berdasarkan laporan OJK Regional Sulawesi Selatan (2025), penyaluran kredit UMKM di wilayah ini mencapai Rp 3,54 triliun, menunjukkan peran aktif lembaga keuangan, termasuk LKM, dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, dan lemahnya tata kelola lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji faktor-faktor penyebab serta kinerja LKM secara kualitatif agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi riil di lapangan.

b. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro

Kinerja LKM dapat diukur dari dua aspek utama, yaitu kinerja keuangan dan kinerja sosial. Morduch (1999) menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan mikro tidak hanya dilihat dari profitabilitas, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau masyarakat miskin dan menciptakan dampak sosial positif. Indikator kinerja keuangan mencakup rasio profitabilitas, efisiensi operasional, dan tingkat *non-performing loan* (NPL), sedangkan indikator kinerja sosial meliputi jumlah nasabah, jangkauan layanan, dan tingkat kepuasan masyarakat (Armendáriz & Morduch, 2010). Dalam konteks LKM di Indonesia, Kuncoro (2022) menekankan bahwa stabilitas kelembagaan dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan lembaga.

Penelitian Saidah dan Jannah (2023) menunjukkan bahwa banyak LKM di daerah mengalami penurunan kinerja akibat lemahnya pengawasan internal dan kurangnya inovasi digital. Kondisi tersebut relevan dengan fenomena di Kabupaten Bone, di mana sebagian besar LKM masih beroperasi secara konvensional dan menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi. Rendahnya literasi digital juga berdampak pada efisiensi layanan dan kemampuan bersaing dengan lembaga keuangan formal seperti BPR dan koperasi modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola menjadi aspek krusial untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan LKM.

Permasalahan utama yang dihadapi LKM di Indonesia mencakup tiga aspek: regulasi, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Mukhlisin (2022) menyebutkan bahwa sebagian LKM menghadapi kendala dalam memperoleh izin usaha dari OJK, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan. Di sisi lain, aspek sosial seperti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan juga menjadi tantangan besar. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa meskipun indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51%, namun untuk sektor keuangan mikro masih di bawah 2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan LKM belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat miskin secara luas, terutama di daerah pedesaan seperti Kabupaten Bone.

Faktor lain yang turut memperburuk kondisi LKM adalah lemahnya penerapan *good financial governance* (tata kelola keuangan yang baik). Menurut OECD (2015), tata kelola yang lemah dapat menyebabkan inefisiensi, penyimpangan keuangan, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh sebab itu, keberhasilan LKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Konsep inklusi keuangan menjadi landasan teoritis penting dalam memahami peran LKM. Sarma dan Pais (2011) menyatakan bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk menyediakan akses yang adil dan efektif terhadap layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat. LKM berperan sebagai jembatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Penelitian Tambunan (2021) menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inklusi keuangan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dalam konteks Kabupaten Bone, peningkatan akses masyarakat terhadap LKM dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

c. **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi juga erat kaitannya dengan fungsi sosial LKM. Menurut Zimmerman (2000), pemberdayaan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengontrol sumber daya keuangan dan mengambil keputusan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Dengan demikian, LKM bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat. Kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang LKM di Indonesia masih berfokus pada aspek keuangan dan kuantitatif, seperti rasio profitabilitas dan pembiayaan. Namun, penelitian yang menelaah permasalahan dan kinerja LKM di tingkat daerah secara kualitatif berbasis data sekunder masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan kualitatif penting untuk menggali makna di balik angka dan memahami konteks sosial, regulatif, dan kelembagaan yang memengaruhi kinerja lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis data sekunder dari OJK dan BPS secara mendalam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan dan kinerja lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bone.

3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro (LKM) di Kabupaten Bone berdasarkan data yang telah tersedia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna dan konteks dari data sekunder yang diperoleh, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan angka statistik, tetapi juga menjelaskan dinamika sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya (Creswell, 2014). Fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap kinerja dan permasalahan LKM, meliputi aspek tata kelola, pembiayaan, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari OJK mencakup statistik lembaga keuangan mikro, tingkat pembiayaan, rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*), dan indikator kinerja lembaga keuangan. Sedangkan data dari BPS mencakup indikator sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan, jumlah unit usaha mikro dan kecil, serta perkembangan ekonomi daerah. Penggunaan data sekunder dinilai relevan karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap kondisi LKM tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengakses laporan tahunan dan publikasi resmi dari OJK dan BPS, sedangkan kajian pustaka dilakukan dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Jurnal Internasional Multidisiplin Ilmu (JIMI) p-ISSN 2088-53xx e-ISSN 2776-34xx

dengan topik LKM, kinerja lembaga keuangan, dan inklusi keuangan di daerah. Data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti efektivitas pembiayaan, tantangan kelembagaan, dan dampak sosial ekonomi. Metode ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk menilai kondisi aktual lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bone.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan pendekatan sistematis untuk menafsirkan makna dari data teks melalui proses pengodean, kategorisasi, dan interpretasi. Peneliti melakukan analisis dengan cara menelusuri pola, kecenderungan, dan faktor-faktor penyebab yang muncul dari data OJK dan BPS, kemudian mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini membantu mengungkap relasi antara variabel kinerja LKM dengan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasionalnya. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Menurut Moleong (2019), triangulasi dilakukan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber agar hasil analisis lebih akurat dan terpercaya. Dalam hal ini, data dari OJK diverifikasi dengan data BPS dan laporan pemerintah daerah Bone, serta dibandingkan dengan temuan dari literatur akademik. Triangulasi ini memastikan bahwa hasil analisis tidak bias terhadap satu sumber tertentu dan mencerminkan realitas kondisi keuangan mikro di lapangan secara objektif.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan kinerja lembaga keuangan mikro melalui pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian lembaga keuangan mikro di daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah dan OJK dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan dan pembiayaan mikro di Kabupaten Bone.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kinerja Keuangan LKM Kabupaten Bone Masih Fluktuatif

Pada tingkat nasional, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah penyelenggara LKM yang berizin tercatat sebanyak 246 entitas per Januari 2025. (OJK) Data statistik LKM Indonesia juga menunjukkan bahwa aset lembaga keuangan mikro secara agregat masih dalam skala yang terbatas. (Fiskal Kemenkeu) Dengan memperhitungkan skala nasional tersebut, maka secara proporsional lembaga-lembaga di wilayah seperti Kabupaten Bone kemungkinan memiliki aset jauh di bawah rata-rata nasional dan rentan terhadap fluktuasi likuiditas. Selanjutnya, meskipun data spesifik untuk Kabupaten Bone belum tersedia publik secara terbuka, indikasi fluktuasi dapat dihubungkan dengan tantangan pengelolaan risiko seperti meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) setelah pandemi serta biaya operasional yang tetap harus ditanggung oleh lembaga skala kecil. Kondisi ini berarti bahwa meskipun lembaga telah aktif menyalurkan pembiayaan, efektivitas dan profitabilitasnya bisa terbatas. Tambahan pula, data literasi dan inklusi keuangan nasional juga memberikan gambaran bahwa masyarakat di sejumlah daerah belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan mikro dengan baik. Sebagai contoh, indeks inklusi keuangan Indonesia naik menjadi 80,51 % pada 2025. (OJK) Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun akses formal meningkat, penetrasi ke kelompok mikro yang dilayani oleh LKM bisa saja masih rendah yang berarti potensi pembiayaan yang belum tergarap optimal di Kabupaten Bone. Terakhir, digitalisasi proses operasional menjadi aspek penting namun masih belum merata di banyak LKM. Literasi digital lembaga dan nasabah yang terbatas menyebabkan efisiensi belum maksimal. Kombinasi aset kecil, biaya tinggi, risiko kredit dan rendahnya efisiensi operasional

menghasilkan kinerja keuangan yang cenderung fluktuatif dan berpotensi terbatas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

b. Jangkauan LKM Masih Minim terhadap Kelompok Rentan

Hasil survei SNLIK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 % dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 % pada 2025. (OJK) Namun, ketika dilihat dari segmen keuangan syariah, literasi hanya 43,42 % dan inklusi hanya 13,41 %. (Neraca) Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem keuangan formal semakin inklusif, lembaga-mikro seperti LKM belum secara penuh menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan pembiayaan mikro dan edukasi keuangan yang memadai. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan indeks literasi keuangan hanya sebesar 59,60 % dan inklusi sebesar 75,70 %. Sementara di perkotaan literasi 70,89 % dan inklusi 83,61 %. (GoodStats Data) Karena Kabupaten Bone memiliki karakteristik yang sebagian besar pedesaan, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat literasi dan inklusi di sana mungkin berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menyiratkan bahwa LKM di daerah tersebut menghadapi tantangan untuk menjangkau kelompok usaha mikro yang kurang terlayani. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro, batasan jangkauan ini berarti bahwa LKM belum optimal bertindak sebagai wahana inklusi keuangan yang efektif: banyak pelaku usaha mikro dan rentan mungkin belum mengenal produk, belum mengakses layanan atau belum menggunakan layanan secara produktif. Oleh karena itu, inovasi produk yang sesuai, jaringan distribusi yang lebih luas, dan edukasi keuangan yang terarah sangat diperlukan. Akhirnya, penguatan jangkauan LKM terhadap kelompok rentan tidak hanya membutuhkan aspek teknis pembiayaan, tetapi juga peran aktif dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk meningkatkan literasi, membangun kepercayaan, dan menurunkan hambatan akses agar inklusi di tingkat mikro, terutama di Kabupaten Bone, dapat meningkat secara signifikan.

c. Permasalahan Operasional Menghambat Kinerja LKM

Literatur dan laporan kajian ekosistem lembaga pembiayaan mikro menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan (*governance*) dan manajemen risiko merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan. Sebagai contoh, laporan menyebut bahwa meskipun LKM dalam pengawasan relatif sedikit, tetapi aset yang dikelola relatif cukup besar sehingga tekanan manajerial menjadi signifikan. (Fiskal Kemenkeu) Di Kabupaten Bone, di mana lembaga lembaga mikro mungkin berukuran kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta sistem manajemen risiko, maka hambatan ini sangat mungkin muncul. Keterbatasan akses permodalan dan perizinan juga menjadi hambatan. Data dari OJK menunjukkan bahwa jumlah lembaga yang berizin terbatas (246 entitas per Januari 2025) sehingga persaingan untuk mendapatkan modal dan akses produk keuangan menjadi nyata. (OJK) Untuk LKM lokal seperti di Bone, kondisi ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam membiayai ekspansi, mengadopsi teknologi, atau mendorong inovasi produk.

Literasi digital lembaga dan nasabah yang rendah juga memperlambat transformasi operasional. Dalam konteks inklusi digital keuangan, masyarakat pedesaan dan lembaga kecil masih tertatih pada adaptasi teknologi finansial. Sebagaimana survei SNLIK menunjukkan gap literasi antara perkotaan dan perdesaan. (GoodStats Data) Hal ini memperburuk efisiensi operasional LKM di Kabupaten Bone, yang mungkin belum mampu memanfaatkan kanal digital untuk menjangkau nasabah, menurunkan biaya operasional, atau meningkatkan kecepatan layanan. Program edukasi literasi keuangan di Kabupaten Bone semakin intensif digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar bersama pemerintah daerah. Sebagai

contoh, pada Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 di Kabupaten Bone dilaksanakan sosialisasi kepada santri di Pesantren Al Amir Fil Jannah dengan peserta sebanyak 1.100 orang dan pembukaan 1.100 rekening Simpel IB serta agen Laku Pandai, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan inklusi keuangan formal. (ANTARA News Makassar). Prestasi inklusi keuangan lokal juga terbukti melalui penghargaan yang diterima Kabupaten Bone, yaitu penghargaan TPAKD Award 2025 untuk tingkat kabupaten/kota wilayah Sulawesi yang menunjukkan keberhasilan dalam memperluas akses keuangan daerah dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone)

Dalam ranah penelitian, terdapat studi yang dilakukan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone terhadap pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan syariah (koefisien 0,829) dan kesejahteraan pelaku UMKM (koefisien 0,227). Studi ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan termasuk dalam konteks syariah merupakan pendorong penting bagi inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Bone. (Journals UPI YAI) Meskipun data persentase literasi atau inklusi keuangan spesifik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bone belum ditemukan publik secara terbuka, bukti-kegiatan edukasi dan penelitian lokal tersebut mengindikasikan bahwa literasi dan inklusi keuangan masih dalam tahap peningkatan dan belum mencapai tingkat nasional penuh. Oleh karena itu, data empiris menunjukkan adanya kebutuhan yang jelas untuk memperkuat edukasi keuangan, memperluas akses layanan finansial formal, dan mendorong perilaku keuangan yang inklusif di Kabupaten Bone.

Dengan demikian, kombinasi hambatan tata kelola, modal, teknologi dan literasi menunjukkan bahwa LKM di Kabupaten Bone menghadapi risiko yang serius bila tidak segera diantisipasi risiko meliputi kinerja buruk, NPL yang meningkat, ketidakmampuan memperluas jangkauan, serta potensi tertinggal dibandingkan lembaga yang lebih mapan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sekunder dan kajian literatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa keberadaan LKM memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang mudah dijangkau. Namun, kinerja LKM masih menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola yang belum optimal, keterbatasan permodalan, serta rendahnya adopsi teknologi digital dalam operasional lembaga. Meskipun data menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan UMKM di Kabupaten Bone cukup besar serta telah memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, jangkauan LKM masih belum maksimal terutama pada kelompok rentan dan pelaku usaha di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi keuangan rendah. Hal ini menandakan bahwa LKM belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang efektif. Selain itu, tantangan dalam manajemen risiko dan terbatasnya inovasi produk keuangan menyebabkan LKM belum dapat bersaing secara optimal dengan lembaga keuangan lainnya di daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga keuangan diperlukan untuk memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas layanan digital. Dengan demikian, LKM di Kabupaten Bone masih memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi lebih kuat terhadap peningkatan ekonomi lokal. Keberlanjutan dan efektivitas lembaga ke depan sangat bergantung pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, dukungan kebijakan yang komprehensif, dan transformasi digital dalam sistem pelayanan keuangan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics Of Microfinance* (2nd Ed.). MIT Press.

- Antara SULSEL. (2025). OJK SULSEBAR Perkuat Literasi di Kabupaten Bone. <https://makassar.antarnews.com>
- Agus Dwi Darmawan. (2025). Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Bone 822,76 ribu Jiwa. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010. Katalog BPS: 9205.7311. Diakses Pada 19 Oktober (Https://Web-Api.Bps.Go.Id/Download.Php?F=Tkpg6tbbx8m6vbtfu004g010uu1mt0htzwzmtllguk5vtwiytnxehlbznncyujvakfwbncwwnnuewewc1lou3g4ckxbl2nsovdknctuzmltz0i2atjkcxo1clqzqtbbqquf mtdlwsu42dddkdmjgzxyxy3p2efu1mda5n1zizzh3bjf2rxjll24vdfjlm2tnv0vqk1hoywd2rwzhhbk hys0n6awfgwvzlune1bkf1ehbedlfdogz0rne4wuw2efnauzzddfhptjbwtfk3zzziauf3szk2euq1eef pahjir2srbg5pejhurujtvfdrvlhteju0nauvg0uctlvvlfak1ab1lxvthldndycxg3bwy%3D)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Keuangan Dan UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Kabupaten Bone Dalam Angka 2024. Bone: BPS Kabupaten Bone.
- Bumi Arung Palakka Sumange Tealara. (2025). Apresiasi Nasional untuk Bone: Kabupaten Raih Penghargaan TPAKD Award 2025. <https://bone.go.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Diskominfo-SP SULSEL. (2024). Hingga 21 Mei, Sebanyak Rp6,43 Triliun Dana KUR Beredar di Masyarakat Sulsel. <https://sulselprov.go.id>.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Ilmi, Nurul et al. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kesejahteraan Melalui peduli Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening. *IKRAITH-EKONOMIKA*, Vol 8 No 1. Doi: 10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kuncoro, M. (2022). *Ekonomi Mikro Dan UMKM Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ledgerwood, J. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington DC: World Bank.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morduch, J. (1999). The Microfinance Promise. *Journal Of Economic Literature*, 37(4), 1569–1614.
- Mukhlisin, M. (2022). Mind The Gap: Theories In Islamic Accounting And Finance. *International Journal Of Islamic Finance*, 14(3), 185–198.
- OECD. (2015). *Principles Of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Lembaga Keuangan Mikro 2023. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Diakses Dari [Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.Aspx][Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.Aspx]
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Direktori Lembaga Keuangan Mikro Juni 2025. Diakses Dari [Https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Direktori/Direktori-

- Lkm/Pages/Direktori-LKM-Juni-2025.aspx](<https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Direktori/Direktori-Lkm/Pages/Direktori-LKM-Juni-2025.aspx>)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, S. (2022). Challenges Of Microfinance Institutions In Rural Indonesia. *Asian Journal Of Economics And Business*, 15(2), 87–102.
- Rakyatku.Com. (2025, Juni). Kredit UMKM Di Sulsel Capai Rp61,62 Triliun, OJK Pastikan Kualitas Tetap Terjaga (OJK Sulselbar). Diakses Dari <https://Rakyatku.Com/Read/235603/Kredit-Umkm-Di-Sulsel-Capai-Rp6162-Triliun-Ojk-Pastikan-Kualitas-Tetap-Terjaga-Ojk-Sulselbar>
- Saidah, N., & Jannah, R. (2023). Digitalization And Performance Of Microfinance Institutions In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 15(4), 245–258.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial Inclusion And Development: A Cross Country Analysis. *Journal Of International Development*, 23(5), 613–628.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2021). *UMKM, Inklusi Keuangan, Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational, And Community Levels Of Analysis. In Rappaport & Seidman (Eds.), *Handbook Of Community Psychology* (Pp. 43–63). Springer.